

## Efektivitas Manajemen Organisasi Pelayanan Publik Pada Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah B

Dedi Prayitno

Akademi Fisioterapi "YAB" Yogyakarta, Indonesia

Corresponding author : [dediprayitno888@gmail.com](mailto:dediprayitno888@gmail.com)

### Abstrak

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah lembaga social masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi warga dan mitra Kelurahan untuk mewujudkan aspirasi kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Penyelenggaraan Musrenbang harus dilakukan dengan ikut mendukung upaya pencegahan korupsi, sehingga diharapkan sasaran dalam fokus Keuangan Negara dapat tercapai dengan baik. Setelah memaparkan hasil dari penelitian dan membahasnya, dapat disimpulkan bahwa proses Musrenbang daerah B sudah berjalan dengan keterlibatan masyarakat yang cukup baik. Walaupun Musrenbang sudah cukup besar yakni kurang lebih 50%- 70%, akan tetapi masih perlu upaya peningkatan peran peran serta RT, RW dan LPMK di daerah B pada proses Musrenbang. Pramusrenbang perlu melibatkan, Ormas/ Lembaga/ Perkumpulan dan pelaku usaha di wilayah sebagai bentuk kerjasama wilayah dan bentuk channeling menjadi pelengkap realisasi kegiatan fisik/ nonfisik yang tidak dapat diampu oleh pelaksana anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

**Kata Kunci:** *pemberdayaan masyarakat; musrenbang; pengawasan; perencanaan; anggaran daerah*

### Abstract

*Village Community Empowerment (LPMK) is an independent community social institution as a forum for participation by residents and Village partners to realize the aspirations of community needs in the field of development. The implementation of Musrenbang must be carried out by supporting efforts to prevent corruption, so that it is hoped that the targets in the focus of State Finance can be achieved well. After presenting the results of the research and discussing them, it can be concluded that the Musrenbang process has been running with fairly good community involvement. Even though the Musrenbang is already quite large, namely approximately 50% - 70%, efforts are still needed to increase the role of RT, RW and LPMK in area B in the Musrenbang process. Pramusrenbang needs to involve mass organizations/institutions/associations and business actors in the region as a form of regional cooperation and a form of channeling to complement the realization of physical/non-physical activities that cannot be handled by budget implementers from Regional Apparatus Organizations (OPD).*

**Keywords:** *community empowerment; musrenbang; supervision; planning; regional budget*

## PENDAHULUAN

Hakekat dan tujuan pembangunan suatu Negara dilakukan atau ditujukan pada mensejahterakan masyarakat, begitupun Negara Indonesia. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dan keamanan dunia (Fartini, 2018).

Perencanaan adalah proses yang kontinu, terdiri dari keputusan maupun pilihan dari berbagai cara untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan

tertentu di masa mendatang (Purwaningsih, 2022). Di Indonesia, tata cara perencanaan pembangunan diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2004). Terdapat lima pendekatan dalam proses perencanaan menurut SPPN, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top- down, dan bottom-up (Manghayu, 2018).

Ditetapkannya Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi momentum pergeseran paradigma sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik. Pada Undang- undang tersebut disebutkan sistem pemerintahan yang dikenal di Indonesia antara lain desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi (Mahanani, 2020). Sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat. Desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah, yang menghasilkan otonomi.

Menurut Maryam (2015) menyebutkan bahwa pada desentralisasi, pembangunan masyarakat memanfaatkan pendekatan pemberdayaan dan cenderung mengutamakan pendekatan dari bawah ke atas (bottom- up) serta partisipatif. Perumusan program dalam identifikasi masalah serta kebutuhan ditentukan oleh dan dari warga sendiri. Latar belakang pendekatan partisipatif adalah masyarakat yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan wilayahnya dan akan mengembangkan sikap memiliki dan tanggung jawab masyarakat.

Menurut Santoso et al., (2015) menyebutkan bahwa pendekatan partisipatif sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Jika dikaitkan dengan Pancasila, sila keempat Pancasila pula terdapat makna jika Indonesia menganut kedaulatan rakyat dalam sistem perwakilan. Selain itu, partisipasi rakyat menjadi salah satu prinsip good governance (Setiawan, 2011). Guna mewujudkan partisipasi dalam proses perencanaan, terdapat forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) pada semua level perencanaan pembangunan, baik di daerah maupun nasional (Santoso et al., 2015)

Pasal 1 ayat 11, UU SPPN menyebutkan bahwa musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang dimulai dari satuan pemerintahan yang paling bawah, yaitu tingkat kelurahan/ desa, dan kemudian secara hierarki naik ke atas, yakni tingkat kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, sampai nasional (Faisal & Ikaputra, 2022). Pengaturan lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negara Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 (Ismawati et al., 2023) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Musrenbang menjadi forum musyawarah sebagai ruang dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan diakhiri dengan pengambilan keputusan bersama (Henri, 2020) . Model konsultasi ini secara teoritis menjadi metode untuk mendorong rasa memiliki dan demokrasi. Akan tetapi, musrenbang belum kuat menyelesaikan masalah yang sebenarnya berlangsung di masyarakat, belum menunjukkan konsistensi, dan partisipasi dianggap belum optimal (Kusniadi, 2020).

Menurut (Fitri & Magriasti, 2020) mengidentifikasi bahwa tidak seluruh stakeholder sanggup terlibat dalam Musrenbang yang disebabkan minimnya informasi yang sampai kepada masyarakat, serta latar belakang pekerjaan masyarakat yang sebagian besar adalah petani menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang. Partisipasi masyarakat pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dinilai belum maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi informasi dan pendampingan dari SKPD terkait (Haryadi, 2016).

Berbeda dengan penelitian (Agustin, 2016), yang menilai masyarakat di Desa Tunggunjagir, Kabupaten Lamongan telah berpartisipasi aktif pada musrenbang, pelaksanaan pembangunan, sampai dalam pemeliharaan serta kemanfaatan dari proyek pembangunan.

(Maryam, 2015) menyebutkan jika kegiatan musrenbang di berbagai tingkat kurang partisipatif dan dikira masih sebatas kegiatan seremoni.

Penelitian terdahulu lebih banyak menganalisis pelaksanaan Musrenbang pada satu daerah tertentu. Sementara itu, tulisan ini menajamkan penelitian- penelitian terdahulu, dengan membandingkan penerapan musrenbang pada tiga daerah dengan tingkatan yang berbeda agar dapat terlihat perbedaan pada pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. Pertanyaan penelitian tulisan ini adalah bagaimana implementasi perencanaan serta penganggaran partisipatif dalam musrenbang di Indonesia?

Melalui permasalahan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perencanaan dan penganggaran partisipatif pada pelaksanaan musrenbang contoh salah satu daerah di Indonesia, serta memberikan gambaran pelaksanaan musrenbang yang efektif dan partisipatif.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Partisipasi Masyarakat

Pemahaman partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “participation” yang dapat diartikan sesuatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan serta diikuti sertakan maupun mengambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi menggambarkan keterlibatan aktif masyarakat maupun partisipasi tersebut bisa berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Sedangkan dalam kamus lengkap bahasa Indonesia “partisipasi” tentang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan.

Bagi Tahulending et al., (2018) mengemukakan partisipasi lebih pada perlengkapan sehingga dimaknai partisipasi selaku keterlibatan warga secara aktif, dalam ketelibatan segala proses aktivitas selaku media penumbuh kohesifitas antar warga, warga dengan pemerintah pula menggalang rasa mempunyai serta tanggung jawab pada program yang di jalani. Sebutan partisipasi jadi kata kunci dalam tiap program pengembangan warga, seolah- olah jadi model baru yang wajib menempel pada tiap rumusan kebijakan serta proposal proyek. Pada pengembangannya kerap kali di ucapkan namun kurang di praktekkan sehingga cenderung kehabisan arti. Partisipasi proporsional dengan makna kedudukan dan, turut dan, keterlibatan ataupun proses bersama silih menguasai, merancang, menganalisis serta melaksanakan aksi oleh beberapa anggota warga (Simabura, 2009).

Menurut Dwiningrum et al., (2023) partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun aktivitas. Lebih lanjut diuraikan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program- program pembangunan. Menurut Made Pirdata (Dwiningrum, 2002) partisipasi yaitu pelibatan seseorang maupun beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental serta emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki dalam berbagai aktivitas yang dilaksanakan dan mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Menurut Theodorson (Haetami & Triansyah, 2001) menyatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan dan profesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.

### Peran Serta Masyarakat

Memahami makna partisipasi seperti dijelaskan sebelumnya yang merujuk dari bahasa Inggris yaitu dari kata “participation” secara ringkas diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau mengambil bagian aktivitas suatu organisasi. Kaitannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi adalah adanya keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti adanya hubungan proses penentuan arah

dari penetapan strategi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Sedangkan makna dalam kamus lengkap bahasa Indonesia “partisipasi” berarti hal turut berperan serta dalam suatu aktivitas organisasi.

Menurut Dwiningrum (2002) partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Menurut Made Pirdata (Dwiningrum, 2002) partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Menurut Theodorson (Haetami & Triansyah, 2001) menyatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan dan profesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.

Pendapat Nisa & Anwar (2020) mengemukakan terdapatnya tiga ragam partisipasi, yakni:

- a. Partisipasi Terbatas, ialah partisipasi yang hanya digerakkan untuk kegiatan- kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pembangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas.
- b. Partisipasi Penuh, maksudnya partisipasi seluas- luasnya dalam segala aspek kegiatan pembangunan.
- c. Mobilisasi Tanpa Partisipasi, artinya partisipasi yang dibangkitkan pemerintah maupun penguasa, tetapi masyarakat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk turut mengajukan tuntutan maupun mempengaruhi jalannya kebijakan pemerintah

Bagi (Jufri, 2020) menjelaskan jika partisipasi adalah keterlibatan mental maupun emosional orang- orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk membagikan kontribusi pada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab untuk mencapainya. Sementara itu dalam (Aminah & Prasetyo, 2018) berpendapat jika partisipasi merupakan kesediaan masyarakat secara suka rela untuk membantu kelangsungan program- program pemerintah yang tercermin dari pikiran, sikap dan tindakan mereka berdasarkan model kerangka partisipasi yang di kembang baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun tahap pengambilan manfaat dari program yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka.

Partisipasi masyarakat adalah peran dan seorang maupun kelompok masyarakat dalam mengenali permasalahan, pengambilan keputusan dan memberikan alternatif solusi melalui pikiran, keahlian, waktu, modal serta ataupun materi terhadap program yang di laksanakan oleh pemerintah (Kaehe et al., 2019). Sebagai sebuah tujuan, partisipasi merupakan pemberdayaan yaitu setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya (Pipit Sundari, 2020). Partisipasi masyarakat adalah hak dan kewajiban seseorang warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Partisipasi dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan semua kemampuan yang di milikinya dalam seluruh kegiatan yang di laksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas seluruh keterlibatan (Andi et al., 2019). Partisipasi yang di dorong oleh mental serta emosi di sebut partisipasi otonom, sedangkan partisipasi yang di dorong oleh paksanaan di sebut mobilisasi. Partisipasi mendorong seseorang maupun kelompok untuk menyumbang atau mendukung kegiatan bersama berdasarkan kesukarelaan sehingga tumbuh rasa tanggung jawab bersama terhadap kepentingan kelompok maupun organisasi.

Partisipasi masyarakat menurut Andreeyan (2014) yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian permasalahan dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative penyelesaian untuk mengatasi masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, serta keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung masyarakat dengan pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Sementara itu menurut

(Sombang, 2021) menegaskan jika partisipasi masyarakat telah menggali konsep partisipasi menuju pada suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai golongan kecil yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menurut (Dewi Wulaningrum, 2018) partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan. Keputusan di dalam tahapan proses pembangunan mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan (Gedeona, 2015). Di sini masyarakat tidak hanya penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan. Dengan demikian partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program maupun proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri yang bersifat proaktif dan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesempatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, terdapat tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut. Ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

### **Perencanaan Pembangunan**

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat bersumber pada unsur-unsur yang membentuknya yakni: perencanaan dan pembangunan. Bagi (Rahil et al., 2022) bahwa teori perencanaan yang ideal ialah yang tidak hanya mampu mengakomodasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat tetapi juga mampu mamadukan berbagai kepentingan yang terlibat. Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternative maupun keputusan-keputusan yang didasarkan pada fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/ aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik dalam rangkaian mencapai tujuan yang lebih baik (Rahil et al., 2022). Lebih lanjut (Mastuti et al., 2021) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman atau acuan maupun dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), dan perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendorong, dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus dapat memperkirakan tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, dan juga disusun berdasarkan fakta riil di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah sebagai alat merencanakan untuk masa yang akan datang, untuk melakukan perubahan yang lebih baik dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan tersebut.

### **Pengawasan**

Menurut Sibuea & Rustam (2022) mengemukakan ada sembilan jenis-jenis pengawasan yaitu :

- a. Pengawasan Fungsional, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap kelembagaan atau organisasi apapun bentuknya besar maupun kecil senantiasa membutuhkan pengawasan, tetapi kelembagaan yang bentuknya kecil pengawasan yang dilakukan tidak perlu secara fungsional, tetapi kelembagaan yang bentuknya besar, seperti kelembagaan negara dengan aktifitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang sifatnya fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus dibidang pengawasan.
- b. Pengawasan Masyarakat, Sebagaimana kita ketahui negara mempunyai masyarakat sebagai warga negara, dan pemerintah sebagai penyelenggara negara, agar penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusional dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya negara, maka sangat dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai warga negara. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara

negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama negara. Secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya negara adalah penguasa, terutama penyelenggara pemerintahan, misalnya manipulasi pajak, keuangan dan sebagainya.

- c. Pengawasan Administratif, Penataan pelaksanaan seluruh aktivitas dalam bagi seluruh kelembagaan agar dapat tercipta keteraturan, maka diperlukan suatu bentuk pengawasan yang kita istilahkan pengawasan administratif.
- d. Pengawasan Teknis, Selain pekerjaan dalam sebuah kelembagaan atau organisasi yang berkaitan dengan kegiatan administratif, sesungguhnya yang tidak kalah pentingnya adalah kegiatan teknis karena pekerjaan ini akan dapat memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan manusia.
- e. Pengawasan Pimpinan, Sebagaimana kita maklumi bahwa setiap kelembagaan senantiasa terdapat dua unsur posisi manusia di dalamnya: pertama, unsur sebagai pemimpin; dan kedua, sebagai unsur yang di pimpin. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin, sedangkan sebagai unsur pemimpin memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri. Tanpa adanya pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat dikatakan para pelaksana kegiatan akan tidak disiplin kerja. Pengawasan Barang, Semuanya orang akan mengatakan bahwa apabila suatu barang dikelola atau diurus oleh seseorang atau sekelompok orang tidak akan terjamin keamanannya apabila tidak ada yang mengawasinya. Pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin terhadap keamanan suatu barang maupun akan memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut.
- f. Pengawasan Jasa, adalah suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya ini, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jikalau tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas.
- g. Pengawasan Internal, Apabila kita melihat bahwa kelembagaan itu memiliki jangkauan yang luas dan terbentuk sub-sub kelembagaan didalamnya, misalnya kelembagaan negara yang memiliki sub kelembagaan antara lain kelembagaan eksekutif, legislatif, yudikatif, auditif dan semacamnya. Pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah yang dimaksudkan disini pengawasan internal.
- h. Pengawasan Eksternal, adalah pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan di luar sub kelembagaan tertentu, misalnya BPK. Pengawasan yang dilakukan oleh BPK kepada lembaga negara lainnya disebut dengan pengawasan eksternal. Setiap unit kelembagaan senantiasa mengharapkan pengawasan eksternal secara efektif dan efisien dari pada seluruh penggunaan sumberdaya yang dimiliki oleh lembaga yang bersangkutan.

## Pembangunan

Secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melaksanakan perubahan. Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai akibat adanya pembangunan (Akbar, 2019).

Bagi Undap (2017) pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang, organisasi, maupun yang dilakukan oleh bangsa atau negara dengan mengarah kepada perbaikan kualitas kehidupan dengan mencegah terbentuknya suatu bentuk kemiskinan atau kemarjinalan. Pendapat lain menurut (Hariyoga, 2013) mengemukakan pembangunan

merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara- cara yang tidak menimbulkan kerusakan baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.

Dari hasil penelitian sebelumnya, pelaksanaan Musrenbang di ketiga wilayah di Indonesia tersebut diidentifikasi tidak dilaksanakan sebagaimana syarat. Maryam (2015) mengidentifikasi pelaksanaan Musrenbang Desa Kebumen, Kabupaten Tanggamus yang belum melibatkan masyarakat terutama pada perumusan kegiatan prioritas. Pada proses pembangunan Pasar Randudongkal di Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pematang, peneliti mengidentifikasi aspirasi masyarakat yang dikesampingkan (Damaik, 2019). Sedangkan (Rachman & Santoso, 2015) mengatakan pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bandung dikalahkan oleh pendekatan politis.

### **Metodologi Penelitian**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan tulisan (Lara, 2022). Pendekatan metode kualitatif yang digunakan adalah metode penelitian kasus pelaksanaan Musrenbang penyusunan RKPD. Pendapat (Zaluchu, 2020) mengatakan bahwa analisis kualitatif penelitian kasus dilakukan dengan mengeksplorasi proses serta peristiwa yang disertai dengan analisis terhadap masalah yang terjadi. Tahap awal dilakukan dengan merangkum pelaksanaan musrenbang dari berbagai tingkat, yaitu musrenbang desa, musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten. Dari ketiga studi kasus tersebut, penelitian ini menggambarkan sekaligus menganalisis perencanaan dan penganggaran partisipatif dalam pelaksanaan musrenbang daerah. Penilaian tingkat partisipasi menggunakan teori (Abdul Juli Andi Gani, 2020) dalam Maryam (2015) yang membagi delapan tingkat partisipasi masyarakat untuk kemudian disandingkan dan dibandingkan pelaksanaannya dari sisi keterbukaan informasi, partisipasi dan keaktifan masyarakat, serta pengambilan keputusan. Tahap selanjutnya merumuskan rekomendasi pelaksanaan musrenbang yang efektif dan partisipatif.

Penelitian ini menggunakan data primer berupa data yang ada di lingkup daerah yakni data dan informasi mengenai kelompok masyarakat.serta fakta dan pendapat yang ada dimasyarakat, kemudian data sekunder yang berasal dari publikasi ilmiah dan penelitian terdahulu yang menganalisis pelaksanaan musrenbang daerah, maupun sumber tertulis lain yang menunjang.

### **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat,dan mengumpulkan semua secara objekif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi dilapangan yaituberupa catatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Kata-kata dan tindakan dari informan merupakan sumber data utama

Pengumpulan data dilakukan dengan metode:

1. Kuesioner dengan mengajukan pertanyaan tidak langsung kepada responden dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner ini disebarkan peneliti berdasarkan kuesioner yang dibuat peneliti dengan acuan dari teori-teori yang berhubungan dengan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan di Kota B.
2. Wawancara dengan masyarakat. Sehingga pengambilan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode convenience sampling dengan pengambilan data dilakukan dengan prosedur survey dengan menggunakan kuesioner secara tertulis yang diberikan langsung dan google- form kepada informan. Jumlah sampel yang terkumpul berjumlah 70 Informan yang tersebar di 14 kemantren dan 45 kelurahan.

### **Metode Analisis Data**

#### **Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses merangkum atau penyerderhanaan data yang dilakukan

melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna ditampilkan dengan bentuk tabel, sehingga memudahkan didiskripsikan dan penarikan kesimpulan.

### Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

### Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif dan Pembahasan

Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan dan karakteristik informan terhadap item-item permasalahan dalam kuesioner. Informan dalam penelitian ini adalah para pengurus LPMK di daerah B dan komponen-komponen masyarakat yang terlibat dalam usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

### Gambaran Umum Informan

Gambaran umum informan diperoleh dari data bagian informasi demografi yang terdapat pada kuesioner penelitian. Pada bagian informasi demografi terdapat bagian identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin, status pekerjaan, status dalam masyarakat, golongan masyarakat, tingkat pembelajaran, range usia dan klasifikasi unsur dalam tahapan Musrenbang. Adapun gambaran umum informan, dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Jenis Gender Informan**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
Pria	42	60
Wanita	28	40
Jumlah	70	100

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa informan pria sebanyak 42 orang sebanyak 60%, sedangkan wanita sebanyak 28 orang sebanyak 40%. Sehingga informan terbanyak adalah pria sebanyak 42 orang.

**Tabel 2. Status Pekerjaan Informan**

Status Pekerjaan	Frekuensi	Prosentase
Wakil Rakyat	0	0.00
PNS/TNI/POLRI/Pensiunan	8	11.43
Swasta/Wiraswasta	19	27.14
Karyawan Swasta	14	20.00
Petani/Peternak/Pedagang	2	2.86
Ibu Rumah Tangga	14	20.00
Pelajar/Mahasiswa	3	4.29
Lainnya	10	14.29
Jumlah	70	100.00

Diketahui, berdasarkan Tabel 2, dari 70 informan dengan status pekerjaan PNS/TNI/POLRI/Pensiunan tingkat prosentase 11,43% sebanyak 8 orang, status pekerjaan swasta/wiraswasta tingkat prosentase 27,14% sebanyak 19 orang, status pekerjaan karyawan swasta tingkat prosentase 20% sebanyak 14 orang, status pekerjaan petani/peternak/pedagang prosentase 2,86% sebanyak 2 orang, status pekerjaan ibu rumah tangga prosentase 20% sebanyak 14 orang, status pekerjaan pelajar prosentase 4,29% sebanyak 3 orang, status pekerjaan lainnya dengan tingkat prosentase 14,29% sebanyak 10 orang. Terlihat, jumlah informan terbanyak adalah 19 orang dengan status pekerjaan swasta/wiraswasta.

**Tabel 3. Status Dalam Masyarakat Informan**

Status dalam masyarakat	Frekuensi	Prosentase
Tokoh Masyarakat	24	34.29
Masyarakat Umum	24	34.29
Asosiasi	1	1.43
Organisasi Masyarakat	16	22.86
Pemangku Wilayah	5	7.14
Jumlah	70	100.00

Diketahui, berdasarkan Tabel 3, dari 70 informan dengan status dalam masyarakat sebagai tokoh masyarakat prosentase 34,29% sebanyak 24 orang, status dalam masyarakat sebagai masyarakat umum prosentase 34,29% sejumlah 24 orang, status dalam masyarakat sebagai anggota asosiasi prosentase 1,43% sebanyak 1 orang, status dalam masyarakat sebagai organisasi masyarakat prosentase 22,86% sebanyak 16 orang dan status dalam masyarakat sebagai pemangku wilayah prosentase 7,14% sebanyak 5 orang. Informasi ini menjelaskan, jumlah informan terbanyak adalah 24 orang berstatus dalam masyarakat sebagai tokoh masyarakat dan masyarakat umum.

**Tabel 4. Informan Berdasarkan Penyandang Disabilitas**

Penyandang Disabilitas	Frekuensi	Prosentase
Ya	0	0
Tidak	70	100
Jumlah	70	100

Diketahui, berdasarkan Tabel 4 bahwa informan penyandang disabilitas tidak ada dan semua informan dalam kondisi normal 100% yakni 70 orang.

**Tabel 5. Tingkat Pendidikan Informan**

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
SD, SLTP	3	4.29
SMU/SMK	22	31.43
Diploma, Sarjana, Pascasarjana	45	64.29
Jumlah	70	100.00

Berdasarkan Tabel 5 bahwa dari 70 informan dengan persentase 4,29% sebanyak 3 orang berpendidikan SD, SMP. Selanjutnya 22 informan dengan persentase 31,43 % berpendidikan SMU/SMK. Terakhir sebanyak 45 informan dengan persentase 64,29 % berpendidikan Diploma, Sarjana, Pascasarjana. Disimpulkan jumlah informan terbanyak yaitu 45 orang jenjang pendidikan Diploma, Sarjana, Pascasarjana.

**Tabel 6. Tingkat Usia Informan**

Usia	Frekuensi	Prosentase
1 -20 tahun	1	1.43

21 - 40 tahun	8	11.43
41 - 60 tahun	46	65.71
61 tahun ke atas	15	21.43
Jumlah	70	100.00

Berdasarkan Tabel 6 dari 70 informan rentang usia 1-20 tahun dengan prosentase 1,43% sebanyak 1 orang, rentang usia 21-40 tahun dengan prosentase 11,43% sebanyak 8 orang, rentang usia 41-60 tahun dengan prosentase 65,71% sebanyak 46 dan usia lebih dari 61 tahun dengan prosentase 21,43% sebanyak 15 orang. Disimpulkan, jumlah informan terbanyak yaitu 46 orang rentang usia 41-60 tahun.

**Tabel 7. Unsur Masyarakat dalam tahapan Musrenbang**

Unsur dalam Masyarakat	Frekuensi	Prosentase
LPMK	20	28.57
BKM	2	2.86
PKK	9	12.86
RT	9	12.86
RW	3	4.29
Lainnya	27	38.57
Jumlah	70	100.00

Berdasarkan Tabel 7 dari 70 informan dari LPMK dengan prosentase 28,57% sebanyak 20 orang, perwakilan dari BKM dengan prosentase 2,86% sebanyak 2 orang, perwakilan PKK prosentase 12,86 sebanyak 9 orang, perwakilan dari RT dengan prosentase 12,86 sebanyak 9 orang, perwakilan RW dengan prosentase 4,29% sebanyak 3 orang dan perwakilan lainnya dengan prosentase 38,57 sebanyak 27 orang. Maka dari itu jumlah terbanyak dari informan adalah lainnya yang mencapai 27 orang.

### Tanggapan Informan

Kuesioner yang diberikan terdapat tanggapan informan mengenai kondisi di wilayahnya masing masing.

**Tabel 8. Perwakilan setiap RW yang menjadi anggota LPMK**

Perwakilan RW yang menjadi LPMK	Frekuensi	Prosentase
Ya	53	75.71
Tidak ada	17	24.29
Jumlah	70	100.00

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 8, Informan LPMK menjawab Ya ada 75,71 % dan yang 24,29 % menjawab Tidak ada, artinya tidak ada wakilnya di tiap RW tersebut.

**Tabel 9. Perwakilan RW yang menjadi anggota LPMK**

Jumlah Perwakilan	Frekuensi	Prosentase
1 orang	28	49.12
2-3 orang	26	45.61
Lebih dari 3 orang	3	5.26
Jumlah	57	100.00

Tabel 9 menjelaskan bahwa anggota LPMK tidak diwakili oleh perwakilan RW nya ada 1 orang ada 49%, terwakili 2-3 orang 45,61 % dan lebih dari 3 orang wakil di RW nya ada 5,26%.

**Tabel 10. Tingkat keaktifan anggota LPMK**

Tingkat Keaktifan	Frekuensi	Prosentase
Kurang dari 30%	14	20.00
Antara 31-50%	23	32.86
Antara 51-70%	25	35.71
Lebih dari 71%	8	11.43
Jumlah	70	100.00

Sementara kalau dilihat dari Tabel 10 dipahami bahwa peran/ keaktifan masing-masing anggota LPMK bervariasi yakni tertinggi hanya 11,43% (8) yang aktif dan terbanyak di kisaran 35,71% (25) yang aktif.

**Tabel 11. Pertemuan Rutin/Berkala untuk Pengurus LPMK**

Pertemuan Rutin Berkala	Frekuensi	Prosentase
Ada	33	47.14
Tidak	12	17.14
Hanya bila diperlukan	25	35.71
Jumlah	70	100.00

Tabel 11 dapat dipahami bahwa pendapat mengenai pertemuan rutin menjawab bervariasi. Namun pertemuan rutin dilakukan (47,14%) dan kalau ada yang perlu diselesaikan maka pertemuan dilakukan menurut kebutuhan.

**Tabel 12. Pengurus LPMK Berjenis Kelamin Perempuan**

Pengurus Berjenis Kelamin Perempuan	Frekuensi	Prosentase
Ada	58	82.86
Tidak	12	17.14
Jumlah	70	100.00

Pada Tabel 12 bisa dilihat bahwa pengurus bergender perempuan mendominasi dalam kepengurusan LPMK 82.86%. Sementara pengurus bergender Laki-laki hanya 17.14%

**Tabel 13. Pengurus LPMK dari Golongan Difabel**

Pengurus Dari Golongan Difabel	Frekuensi	Prosentase
Ada	58	82.86
Tidak	12	17.14
Jumlah	70	100.00

Pengurus Golongan Difabel cukup banyak yakni 58%, sementara lainnya 17.14%

**Tabel 14. Komunikasi antar pengurus LPMK**

Komunikasi antar pengurus	Frekuensi	Prosentase
Ya, baik	50	71.43
Masih kurang baik	18	25.71
Tidak baik	2	2.86
Jumlah	70	100.00

Apabila dilihat Tabel 14 dapat dipahami bahwa dari komunikasi antar pengurus sudah dianggap cukup baik 71,43%, walaupun masih ada yang merasa kurang baik dalam komunikasinya.

**Tabel 15. Koordinasi yang baik dan kompak antar anggota LPMK**

Koordinasi antar pengurus	Frekuensi	Prosentase
Ya, baik	52	74.29
Masih kurang baik	17	24.29
Tidak baik	1	1.43
Jumlah	70	100.00

Kordinasi dan kekompakan dalam menjalankan aktivitas antar pengurus LPMK sudah dianggap baik yakni 74,29%

**Tabel 16. Kolaborasi LPMK dengan Kelurahan**

Kolaborasi dengan Kelurahan	Frekuensi	Prosentase
Ya, baik	57	81.43
Masih kurang baik	12	17.14
Tidak baik	1	1.43
Jumlah	70	100.00

Antar anggota LPMK dan pihak kelurahan dalam melaksanakan kerjasama/ berkolaborasi sudah baik yakni 81,43%.

**Tabel 17. Proses Musrenbang Mudah dan Efisien**

Proses Musrenbang mudah dan efisien	Frekuensi	Prosentase
Ya, baik	49	70.00
Masih kurang baik	18	25.71
Tidak baik	3	4.29
Jumlah	70	100.00

Tanggapan terhadap pelaksanaan Musrenbang sudah dominan merasakan cukup mudah dan efisien yakni 70.00%

**Tabel 18. Mekanisme Musrenbang efektif mengakomidir aspirasi masyarakat.**

Mekanisme Musrenbang efektif	Frekuensi	Prosentase
Sudah	45	64.29
Masih Belum	25	35.71
Jumlah	70	100.00

Adanya aspirasi yang sudah terwakili/ terakomodir sudah dapat dirasakan yakni 64,29%

**Tabel 19. Keterlibatan Masyarakat dalam proses Musrenbang**

Keterlibatan Unsur Masyarakat	Frekuensi	Prosentase
Kurang dari 30%	6	8.57
Antara 30-50%	20	28.57
Antara 50-75%	38	54.29
Lebih dari 76%	6	8.57
Jumlah	70	100.00

Peran dan keterlibatan masyarakat dalam proses Musrenbang mengatakan bahwa 54,29% sudah menyatakan adanya keterlibatan masyarakat.

**Tabel 20. Pemahaman Masyarakat dalam menyampaikan usulan dalam proses Musrenbang**

Pemahaman Unsur Masyarakat	Frekuensi	Prosentase
----------------------------	-----------	------------

Kurang dari 30%	11	15.71
Antara 30-50%	21	30.00
Antara 50-75%	33	47.14
Lebih dari 76%	5	7.14
Jumlah	70	100.00

Tabel 20 menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat dalam menyampaikan usulan pada proses musrenbang sudah paham dengan mekanisme yang ada yakni 47.14 %

**Tabel 21. Sosialisasi langsung dari Pemerintah tentang pedoman pelaksanaan Musrenbang kepada masyarakat umum**

Sosialisasi langsung dari Pemerintah	Frekuensi	Prosentase
Dilakukan	44	62.86
Tidak	26	37.14
Jumlah	70	100.00

Pada saat pelaksanaan musrenbang, pemerintah langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih paham yakni penilaiannya 62,86%

**Tabel 22. Membaca Buku Pedoman Musrenbang**

Membaca Buku Pedoman Musrenbang	Frekuensi	Prosentase
Ya	45	64.29
Tidak	25	35.71
Jumlah	70	100.00

Sosialisasi dilakukan dan juga menggunakan Buku pedoman sebagai salah satu media penjelasan dan memahamkan program dan musrenbang agar lebih efektif.

**Tabel 23. Pemahaman Isi Buku Pedoman Musrenbang**

Faham isi buku pedoman Musrenbang	Frekuensi	Prosentase
Ya	45	64.29
Tidak	25	35.71
Jumlah	70	100.00

Tabel 23 dapat dipahami bahwa isi buku pedoman sebagai sarana petunjuk pelaksanaan dan transfer informasi sudah membantu masyarakat lebih mudah memahaminya, dalam hal ini 64,29%

## KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah memaparkan hasil dari penelitian dan membahasnya, dapat disimpulkan bahwa: Proses keterlibatan masyarakat pada Musrenbang daerah B sudah cukup baik. Agar proses Musrenbang lebih baik lagi maka perlu beberapa upaya sebagai berikut: Prosentase peran RT, RW dan LPMK di tingkat 50%-70% pada proses Musrenbang hal ini menunjukkan sudah cukup besar. Walaupun saat ini perwakilan terbesar di wilayahnya masih sangat sedikit yaitu 1 orang per RW. Adapun berdasarkan gender atau tingkat keterwakilan perempuan dalam partisipasi serta golongan difabel sudah sangat besar di daerah B. Apabila dilihat dari mekanisme Musrenbang sudah efektif dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dengan tingkat prosentase terbesar adalah 64,29%. Adapun tingkat prosentase terbesar adalah 70,00% menyatakan proses Musrenbang mudah dan efisien dengan tingkat keaktifan partisipan atau subjek dari unsur unsur masyarakat pada proses Musrenbang terbesar berada ditingkat keaktifan antara 51% sampai 70%. Meskipun Peran masyarakat dalam Musrenbang di daerah B sudah cukup baik namun masih

perlu ditingkatkan dengan meng-edukasi masyarakat, menyediakan materi sosialisasi. dan memastikan kemampuan pemegang anggaran dan kewenangan dan dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik.

Saran yang dapat diberikan adalah bahwa peran dan keterwakilan SDM masyarakat dalam musrenbang setiap RW nya masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan Musrenbang lebih maksimal lagi dengan menyempurnakan mekanisme dan materi sosialisasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Juli Andi Gani, I. H. S. U. F. (2020). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Vol. 6 No. 3 (2020)*, 6(1), 389.
- Agustin, R. D. (2016). Kemampuan Penalaran Matematika Mahasiswa Melalui Pendekatan Problem Solving. *Pedagogia : Jurnal Pendidikan*, 5(2), 179–188. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v5i2.249>
- Akbar, S. (2019). Analisis Perencanaan Pembangunan Di Desa Sungai Beringin Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Indragiri*, 1–10.
- Aminah, S., & Prasetyo, I. (2018). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan organisasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM). *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(1), 61–73. <https://doi.org/10.21831/jppm.v5i1.17531>
- Andi, U., Akhwan, A., Ahmad, M., & Nirmawati. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal Moderat*, 5(2), 1–17.
- Andreeyan, R. (2014). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 2(4), 1940.
- Damaik, S. E. (2019). Perencanaan Pembangunan Kehutanan. *Google Buku*, 1–169. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=6ZuxDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=prediksi+produksi+produktivitas+kelapa+sawit+peramalan&ots=YavJNhPNOY&sig=qJv44tkmSPeLXnlNeLYGF2BySgU>
- Dewi Wulaningrum, P. (2018). Pengembangan Kawasan Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Koripan 1 Dlingo. *BERDIKARI : Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 6(2), 131–140. <https://doi.org/10.18196/bdr.6240>
- Dwiningrum, S. I. A. (2002). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi Kasus Objek Wisata Bukit Jamur Di Kecamatan Bungah Gresik)*. 51–58.
- Dwiningrum, S. I. A., Rukiyati, R., Setyaningrum, A., Sholikhah, E., & Sitompul, N. (2023). Digital Literacy Requires School Resilience. *Jurnal Kependidikan Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.21831/jk.v7i1.54642>
- Faisal, G., & Ikaputra, I. (2022). Tipologi Permukiman Di Indonesia: Penjejangan, Dikotomi, Konteks Sosial Dan Spasial. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 9(2), 141. <https://doi.org/10.26418/lantang.v9i2.51813>
- Fartini, A. (2018). Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Al-Ahkam*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i1.1427>
- Fitri, A. L., & Magriasti, L. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(3), 109–120. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i3.73>
- Gedeona, H. T. (2015). Tata kelola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan (studi mengenai partisipasi masyarakat dan kompleksitasnya di Kota Cimahi). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(1), 95–114.
- Haetami, M., & Triansyah, A. (2001). *Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kota Pontianak*. 1–9.
- Hariyoga, H. (2013). Strategi Mensinergikan Program Pengembangan Masyarakat Dengan Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(1), 47–60.

- [https://doi.org/10.29244/jurnal\\_mpd.v5i1.24193](https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v5i1.24193)
- Haryadi, E. (2016). Pengaruh Size Perusahaan, Keputusan Pendanaan, Profitabilitas Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 84–100.
- Henri, I. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Kabupaten Subang. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 30–57. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i1.2338>
- Ismawati, D., Suwarno, S., Pramono, T., Fachruddin, I., & Umanailo, M. C. B. (2023). Implementasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 5(1), 58–68. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v5i1.1502>
- Jufri, B. J. (2020). Tingkat Partisipasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 8(3), 47–53. <https://doi.org/10.51817/jia.v8i3.276>
- Kaehe, D., Ruru, J. M., & Rompas, W. Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80), 14–24.
- Lara. (2022). Customer Relationship Management Strategy In Starbucks Card Optimization In The Pandemic Era. 7, 7787(8.5.2017), 2005–2003. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.11532>
- Mahanani, A. E. E. (2020). Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Res Publica*, 1(2), 17–35. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/46732>
- Manghayu, A. (2018). Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penerapan e-musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(2), 95–115. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/438>
- Maryam, D. (2015). Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Kebumen Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus). *Jurnal Ilmu Dakwah Dan Pengembangan Komunitas*, X(1), 1–21. <http://www.google.com>
- Mastuti, R., Chalik, A., Kurniawan, T. S., & Natasha, N. (2021). Dampak Pembangunan Jalan Desa Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 3(2), 112–120. <https://doi.org/10.37012/jpkmht.v3i2.555>
- Nisa, M., & Anwar, S. (2020). Efektivitas Keluarga Utama Berakhlakul Karimah Dalam Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(3), 351–372. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v5i3.24188>
- Pipit Sundari, T. S. I. A. K. J. N. N. M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Berawa Tibubeneng. *JURNAL CAPITAL : Kebijakan Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 69–81. <https://doi.org/10.33747/capital.v3i2.47>
- Purwaningsih, M. R. (2022). Pelaksanaan Musrenbang Daerah Dalam Proses Perencanaan Dan Penganggaran Partisipatif. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 6(1), 151–164. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.346>
- Rachman, B. J., & Santoso, S. B. (2015). Analisis Pengaruh Desain Produk Dan Promosi Terhadap Kemantapan Keputusan Pembelian Yang Dimediasi Oleh Citra Merek (Studi pada Customer Distro Jolly Roger Semarang). *Diponegoro Journal of Management*, 4(1), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- Rahil, R. R. V., Budi, B. W. A., Asep, A. I. S., & Kustianing, K. S. D. (2022). Konsepsi Sistem Pembelajaran Multimedia Interaktif Taruna Aal Dalam Mendukung Revolusi Industri 4.0. *Saintek: Jurnal Sains Teknologi Dan Profesi Akademi Angkatan Laut*, 14(1), 1367–1384. <https://doi.org/10.59447/saintek.v14i1.81>
- Santoso, C., Surti, T., & Sumardianto. (2015). The Differences in the Use of Solution Citrid Acid

- Concentration in the Production of Stingray's Cartilage Gelatin (*Himantura gerrardi*). *Jurnal Pengolahan Dan Bioteknologi Hasil Perikanan*, 4(2), 106–114. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jpbhp>
- Setiawan, A. (2011). Analisis Pengaruh Rotasi Pekerjaan Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada CV Sempurna Boga Makmur Semarang). In *Jurnal Bisnis Strategi* (Vol. 20, Issue 1, pp. 11–24).
- Sibuea, E. N., & Rustam, T. A. (2022). Pengaruh Harga, Promosi Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sari Roti pada Indomaret Griya Piayu di Kota Batam. *ECo-Buss*, 5(1), 49–59. <https://doi.org/10.32877/eb.v5i1.305>
- Simabura, C. (2009). Membangun Sinergi Dalam Pengawasan Hakim. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 43–62.
- Sombang, N. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Politico*, 10(3), 1–13.
- Tahulending, R., Kaunang, M., & Sumampow, I. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) Di Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat. *EKsekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1–11.
- Undap, G. J. E. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–11.
- Zaluchu, S. E. (2020). Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167>